

# **Visi dan Strategi Pemberdayaan Ekonomi Menurut Perspektif Gerakan Muhammadiyah**

DISAMPAIKAN DALAM  
**TANWIR MUHAMMADIYAH**  
BANDAR LAMPUNG  
5 – 8 MARET 2009

**Muhammad Akhyar Adnan**

Pengurus Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM)  
Kuala Lumpur, Malaysia.

# Visi dan Strategi Pemberdayaan Ekonomi<sup>1</sup>, Menurut Perspektif Gerakan Muhammadiyah<sup>2</sup>,

*The basic question is, what vision do you aspire to?*

*Abraham Maslow*

*"Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."*

*– Japanese proverb*

## Iftitah

Cukup menarik bila organisasi sebesar Muhammadiyah mengangkat tema Visi dan Strategi Pemberdayaan Ekonomi. Mengapa? Karena dapat memancing beberapa pertanyaan, seperti: (1) apakah ini pertanda bahwa Muhammadiyah 'bergeser', setidaknya memperluas cakupan ladang garapnya yang selama ini 'hanya' dikenal sangat dekat dengan dunia pendidikan dan kesehatan<sup>3</sup>, [lalu] akan menggarap juga bidang ekonomi? (2) apakah gerakan ekonomi yang selama ini ada dan dimotori oleh 'majelis ekonomi dan kewirausahaan' bergerak tanpa visi dan strategi, sehingga dirasakan perlunya visi serta strategi untuk masa-masa yang akan datang. (3) lebih menarik lagi bila dilihat judul asli sesuai dengan proposal panitia, ketika dengan tegas ditulis tema: Visi dan Strategi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. Judul ini seakan-akan sudah menegaskan keberpihakan Muhammadiyah kepada apa yang disebut dengan Ekonomi Kerakyatan. Padahal, dari berbagai sumber yang dapat dilacak, masih terlihat perdebatan akademis tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan

---

<sup>1</sup> Judul yang diminta Panitia adalah ".....Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan", namun karena alasan tertentu yang akan dibahas nanti, penulis batasi (tidak masukkan) kata atau istilah 'kerakyatan'.

<sup>2</sup> Disampaikan dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah di Lampung, 5 – 8 Maret 2009.

<sup>3</sup> Selain tajdid dari sisi keagamaan yang sangat dikenal kuat mencegah menyebarnya 'penyakit TBC' (takhyul, bid'ah dan 'c'hurafat).

ekonomi kerakyatan itu [lihat misalnya: <http://www.mail-archive.com/tionghoa-net@yahoogroups.com/thrd2.html#10742>; <http://edosegara.blogspot.com/2008/05/ekonomi-kerakyatan-dan-ekonomi-islam.html>], untuk menyebut beberapa diantaranya]

Pertanyaan pertama di atas, seperti terjawab oleh penjelasan Ketua PWM Jawa Barat, ketika beliau dan PCIM Malaysia bersilaturahmi di Kuala Lumpur, 1 Maret 2009 yang lalu. Beliau mengkonfirmasi dugaan penulis, bahwa memang ada upaya untuk memperluas bidang cakupan sampai ke ranah ekonomi. Ini tentu tidak salah, karena memang sesungguhnya berbagai aspek kehidupan saling berkaitan. Kalau selama ini bidang pendidikan dan kesehatan sudah menjadi ‘trademark’ khas Muhammadiyah yang tidak terbantahkan, maka tidak ada salahnya bidang garap ini diperluas ke ranah ekonomi<sup>4</sup> untuk memperkuat dua bidang garap yang menjadi ladang tradisional Muhammadiyah.

Untuk pertanyaan kedua, ternyata hipotesis penulis keliru. Sebab, ketika penulis malayari situs maya (website) Muhammdiyah, penulis justru menemukan bahwa Majelis ini sudah mempunyai visi dan missi. Dinyatakan bahwa visi [Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan] adalah: *Terciptanya kehidupan sosial ekonomi ummat yang berkualitas sebagai benteng atas problem kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan pada masyarakat bawah.*

Sedangkan missinya dinyatakan dalam portal tersebut sebagai berikut:

- *Mengupayakan pembangunan ekonomi rakyat Indonesia khususnya keluarga besar Muhammadiyah*

---

<sup>4</sup> Konon di ranah ekonomi ini, Muhammadiyah belum pernah menunjukkan keberhasilan, walau konon sudah berkali-kali ada ikhtiar kea rah itu, termasuk [mungkin] kasus Bank Persyarikatan itu.

- *Mengurangi problem kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan pada masyarakat melalui peningkatan kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas.*
- *Menjadi Pelopor, motivator dan atau katalisator pembaharuan/perubahan pembangunan ekonomi rakyat Indonesia berdasarkan nilai - nilai Islam.*

Terlepas dari (a) materi visi dan misi yang sudah tertulis secara resmi tersebut, dan (b) sejauh mana efektifitas sosialisasi dan ikhtiar nyata dalam mencapai atau menjalankannya, maka fakta ini membuktikan kekeliruan 'hipotesis' penulis.

Yang menjadi persoalan adalah diskusi atas butir ketiga dari pertanyaan di atas, yakni (a) apakah benar Muhammadiyah secara nyata dan tegas telah berpihak atas apa yang disebut dengan sistem ekonomi kerakyatan? Kalau iya, kapan dan atas dasar apa *policy* ini diambil, dan apakah pernah dilakukan eksaminasi konseptual akan pilihan ini (b) atau – sesuai dengan pemahaman terakhir penulis, setelah berkali-kali membaca ulang proposal panitia, membaca-baca website PP Muhammadiyah, selain juga [pernah menerima] sms Dr. Haedar Nasir – bahwa Muhammadiyah sedang ingin mewarnai visi kebangsaan Indonesia, baik dalam konteks karakter bangsa, kepemimpinan nasional, pendidikan kebangsaan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Kalau memang niat dan ikhtiar ini benar, maka selain [hal ini] bersifat mulia, proses ini juga sangat berat, memerlukan pemikiran panjang dan mendalam, dan melibatkan banyak pihak yang terkait dan berkepentingan. Barangkali, apa yang kita lakukan hari ini, barulah langkah awal, dan perlu perluasan dan kelanjutan. Oleh karena itu pula, agak berlebihan kalau makalah sederhana dan singkat ini dapat mengurai secara mendalam dan menyeluruh tentang apa yang diharapkan panitia. Namun, dengan segala keterbatasan, penulis akan coba sampaikan pandangan penulis.

Dalam memenuhi harapan Panitia Tanwir ini, penulis coba susun organisasi makalah ini sebagai berikut. Setelah iftitah dan pemetaan pemahaman penulis atas harapan Sidang Tanwir, penulis akan uraikan sekilas tentang visi organisasi. Diikuti kemudian dengan .diskusi tentang pilihan nilai dan system ekonomi sebagai bagian tak terpisahkan dari visi yang akan dicapai, diikuti dengan pembahasan kompatibilitas system ekonomi Islam dengan emasipasi rakyat, serta [sekilas] perkembangan terkini system ekonomi Islam. Pembahasan diakhiri dengan ikhtitam.

### **Sekilas Tentang Visi dan Strategi**

Istilah ‘visi’, seakan-akan baru muncul sejak sekitar dua atau tiga dekade belakangan ini. Seperti terlihat di berbagai macam organisasi, visi sudah menjadi semacam *trend* yang selalu diungkapkan di ‘beranda’ (nyata ataupun maya) berbagai organisasi, besar maupun kecil, bermotif laba, ataupun nirlaba, di tingkat global, nasional, bahkan lokal.

Visi – seperti ditulis oleh Heru<sup>5</sup> (<http://heru.wordpress.com/2006/07/26/mereview-kembali-visi-misi-organisasi/>), – “menggambarkan tujuan atau kondisi dimasa depan yang ingin dicapai. Visi memberikan gambaran yang jelas dimasa mendatang yang bisa dilihat oleh customer, stakeholders, dan employee”. Uraian sedikit lebih jauh tentang visi ini, dapat dilihat dalam lampiran 1 makalah ini.

Visi sebuah organisasi, sangat berkaitan dengan apa yang disebut *strategic plan*. *Strategic plan*, umumnya meliputi “*future vision, a statement that shows your goals, the values that will demonstrate your actions, strategies that you will use to succeed, and a guide which shows your progress.*” (<http://www.exforsys.com/career-center/leadership-skills/how-to-develop-a-powerful-vision.html>).

---

<sup>5</sup> Sangat banyak referensi tentang visi dan leadership yang bisa dirujuk. Ini, hanyalah salah satu saja diantaranya.

Dari berbagai studi dan referensi yang dapat ditelusuri,, tidaklah mudah menyusun visi dan atau strategic plan sebuah organisasi, apalagi sebuah Negara yang merupakan organisasi sangat besar dengan segala aspeknya yang sangat kompleks (lihat misalnya Collins and Poras, 1989?). Visi sebuah organisasi biasanya dapat digali dari *founding fathers* lembaga atau institusi itu, yang sedari awal meletakkan cita-cita dasar, yang menjadi penyebab mengapa lembaga atau organisasi itu didirikan.

Untuk [organisasi Negara] Indonesia, kita bisa merujuk kepada undang-undang dasar NKRI yang secara implisit sudah memberikan visi menyeluruh tentang bangsa Indonesia, yang bukan secara kebetulan memang disusun oleh para *founding fathers* Negara ini. Berdasarkan konstitusi Negara pula, sesungguhnya dapat disimpulkan secara lebih sederhana bahwa visi ekonomi bangsa ini adalah terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, atau dalam ungkapan lain [yang lebih akrab dengan ekspresi Muslim] *dapat diwujudkannya 'baladun thoyyibatun wa rabbun ghafur'*.

Menurut hemat penulis, sesungguhnya visi ini sudah cukup jelas dan tidak pernah dibantah, alias sudah diamini secara serempak oleh semua komponen bangsa. Oleh karena itu, rasanya [mungkin] tidak atau belum perlu untuk merubahnya<sup>6</sup>.

Seperti diungkapkan di atas bahwa strategic plan meliputi beberapa aspek, mulai dari visi itu sendiri, pernyataan yang menyatakan tujuan, nilai-nilai dasar yang melandasi aksi, strategi untuk mencapai sukses dan petunjuk atau indikator yang sekaligus menunjukkan tingkat kesuksesan.

Visi ekonomi bangsa – seperti diungkapkan di atas – rasanya, masih relevan dan tidak ada alasan untuk merubahnya, sedikitnya saat ini sampai dengan sekitar tiga atau empat dekade lagi. Tetapi, persoalan terletak kepada aspek-aspek lain

---

<sup>6</sup> Menurut sebuah teori, sebuah visi memungkinkan untuk dipakai, atau baru perlu diubah setelah 100 tahun, bila kondisi menghendaki. Indonesia [merdeka] baru berumur 64 tahun. Visi ini belum lagi terwujud, sehingga belum perlu untuk dilakukan perubahan.

dalam strategic plan ekonomi bangsa yang meliputi pernyataan yang menyatakan tujuan (*a statement that shows your goals*), nilai-nilai dasar yang melandasi aksi (*the values that will demonstrate your actions*), strategi untuk mencapai sukses (*strategies that you will use to succeed*) dan petunjuk atau indikator yang sekaligus menunjukkan tingkat kesuksesan (*a guide which shows your progress*).

Kalaupun ada sesuatu yang perlu dilakukan berkaitan dengan visi ekonomi bangsa ini lebih berkaitan dengan (a) proses internalisasi visi tersebut ke setiap komponen bangsa, dari atas sampai ke bawah. Saat ini, visi tersebut, [mungkin] tidak dikenali secara memadai, oleh berbagai pihak yang ada dalam bangsa Indonesia, atau kalau beberapa pihak dapat menyebutkannya, [maka itu] barulah sebatas hafalan dan atau *lips service* belaka; oleh karena itu perlu (b) proses sosialisasi dalam arti sesungguhnya ke semua pihak, sehingga [visi tersebut] menjadi pemicu setiap gerakan atau kegiatan ekonomi, dan menjadi impian bersama yang terkoordinasi rapi.

### **Sistem Ekonomi: Kerakyatan, Berkeadilan atau Islam?**

Seperti disampaikan di atas, persoalan strategic plan ekonomi Indonesia, tidak terletak utamanya pada aspek visi, tetapi lebih kepada empat aspek lainnya yang lazimnya menjadi satu paket dengan visi itu sendiri, yakni: pernyataan yang menyatakan tujuan (*a statement that shows your goals*), nilai-nilai dasar yang melandasi aksi (*the values that will demonstrate your actions*), strategi untuk mencapai sukses (*strategies that you will use to succeed*) dan petunjuk atau indikator yang sekaligus menunjukkan tingkat kesuksesan (*a guide which shows your progress*).

Visi, biasanya memang lebih bersifat abstrak dan tidak terlalu mudah (walaupun bukan mustahil) untuk diukur. Oleh karenanya, perlu ada *a statement that shows your goals*. *Goal(s)* atau *objective(s)*, biasanya lebih terukur (measurable) secara umum. Ini berkaitan dengan *a guide which shows your progress*.

Melihat pengalaman gaya pemerintahan Indonesia dua atau tiga periode belakangan ini, hal ini yang justru tidak terlalu baik disusun dan sekaligus tidak disosialisasikan dan diinternalisasikan secara merata kepada semua pihak yang terkait. Sekedar contoh pada Pemerintahan yang sekarang dipimpin oleh pasangan SBY-JK, sesungguhnya mereka juga sudah menyusun visi, misi dan segala atribut terkait (lihat lampiran 2). Namun, betapa banyak yang melakukan kritik dan mengatakan bahwa Sby-Jk tidak mempunyai visi yang jelas. (lihat a.l: Usman Iskandar, 2009; Hermawan Sulisty, 2009) [http://article.wn.com/view/2009/02/14/Pemerintahan\\_SBYJK\\_Dinilai\\_Tidak\\_Memiliki\\_Visi/](http://article.wn.com/view/2009/02/14/Pemerintahan_SBYJK_Dinilai_Tidak_Memiliki_Visi/)

Dalam rangka memenuhi target tanwir ini, yakni ikut membangun visi bangsa, inilah diantara bagian yang mestinya bisa dikontribusikan oleh Muhammadiyah, yakni (a) ikut atau terlibat dalam melakukan setting tujuan terukur secara strategis, dan (b) memastikan diterapkannya nilai-nilai yang sesuai dengan semangat Muhamadiyah (*the values that will demonstrate the actions*), (c) memastikan strategi yang tepat untuk mencapai sukses (*strategies that you will use to succeed*) dan (d) ikut menyusun petunjuk atau indikator yang sekaligus menunjukkan tingkat kesuksesan (*a guide which shows your progress*).

Berkaitan dengan nilai-nilai dan strategi, khususnya di bidang ekonomi, secara teoritis, lazim diakui adanya beberapa sistem perekonomian, seperti kapitalisme dan sosialisme. Inilah dua aliran utama sistem [per]ekonomi[an] yang dominan berlaku di banyak negara dunia. Namun, di Indonesia dikenalkan pula apa yang disebut dengan sistem ekonomi kerakyatan.

Ide ini dipelopori oleh Bung Hatta, dan kemudian diperjuangkan oleh beberapa tokoh. Satu diantaranya yang gigih memperjuangkannya adalah almarhum Prof. Dr. Mubyarto. Sampai-sampai beliau mendirikan Pusat Penelitian Ekonomi Kerakyatan yang kemudian juga menerbitkan Jurnal Ekonomi Rakyat (Lihat misalnya: <http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id>).



Secara legal formal, sesungguhnya nilai dan strategi inilah yang dianut oleh bangsa Indonesia. Setidaknya hal ini dapat dilihat dari beberapa dokumen dasar Negara, baik dalam pembukaan UUD 1945, Pancasila dan batang tubuh UUD 45, terutama dalam pasal 33. Namun, dalam kenyataannya, pilihan strategi ekonomi kerakyatan ini seperti jauh panggang dari api. Sejak rezim Soekarno, Soeharto, Megawati, Gus Dur bahkan SBY-JK, semangat atas pilihan strategi ekonomi seperti yang sudah sangat jelas tertulis dalam lembaran resmi dokumen Negara ini, tidak dapat dilihat secara cukup nyata dalam tataran implementasi. Nilai-nilai yang dianut dan strategi yang dipilih – suka tidak suka – lebih menunjukkan wujud kapitalisme Barat yang memang menjadi bahan ajar, atau acuan utama bagi hampir semua ekonom yang dimiliki bangsa ini, atau setidaknya ekonom yang berpengaruh hingga saat ini.

Kendati strategi ekonomi kapitalistik terbukti gagal, atau setidaknya belum sesuai, atau belum mampu membawa bangsa Indonesia mencapai visinya, ketergantungan kepada pola pikir kapitalisme tidaklah mudah untuk dialihkan begitu saja. Hampir semua kebijakan ekonomi yang pernah diambil, sangat tampak dipengaruhi oleh pola pikir sistem kapitalisme.

Di luar itu, belakangan juga banyak menjadi wacana berbagai pihak (terutama ummat Islam) apa yang disebut dengan sistem [per]ekonomi[an] Islam. Sistem yang mula-mula diwacanakan [kembali] sejak sekitar pertengahan abad ke 20 (1950an), kini menunjukkan perkembangan yang relatif cepat, baik dalam bentuk wacana ilmiah, maupun secara praktis yang hampir selalu berjalan seiring dengan keberadaan bank Islam atau bank syariah. Cakupannya, bukan lagi pada tataran lokal atau nasional, tetapi sudah mengglobal. Bahkan tidak jarang bank Islam sebagai salah representasi pilar ekonomi Islam, sudah semakin diterima keberadaannya di Negara-negara yang tidak memiliki penduduk mayoritas Muslim.

Dalam konteks nilai-nilai dan strategi pencapaian visi rakyat yang adil dan makmur, maka pilihan secara makro, setidaknya bisa dipertimbangkan nilai-nilai

dan sekaligus strategi pilihan system ekonomi kapitalisme, sosialisme, kerakyatan, berkeadilan atau Islam. Rasanya, pilihan akan nilai dan strategi yang mengacu kepada system kapitalisme tidak bisa dipakai lebih jauh, walaupun dalam secara historis dan berdasarkan realitas yang kita rasakan, system ini justru mendominasi system perekonomian Indonesia dalam kurun waktu yang cukup lama. Perkembangan terakhir sejak bermulanya krisis ekonomi dunia, mungkin menjadi bukti lain bahwa pada dasarnya system ini gagal menunjukkan kemampuannya dalam mencapai visi ekonomi bangsa.

Pilihan nilai-nilai dan strategi system perekonomian sosialisme, juga bukan merupakan pilihan yang baik. Mengapa? Karena pada kenyataan system nilai ini juga telah gagal. Lebih jauh, Negara-negara yang selama ini getol mempraktikkan dan mengembangkan system ini, justru beralih kepada system lain. Negara-negara seperti Cina, Sovyet dan Vietnam, mungkin bisa menjadi contoh. Sebaliknya Negara yang masih bertahan dengan system ini, tak kunjung berhasil menunjukkan hasil yang gemilang seperti yang diharapkan.

Pilihan akan nilai-nilai dan srategi ekonomi kerakyatan, sesungguhnya cukup ideal kedengarannya. Akan tetapi, ada beberapa catatan yang dapat dibuat, antara lain: (1) nilai-nilai dan sistem ini belum pernah mendapat kesempatan penerapan optimal sebagaimana mestinya. Betapapun secara formal nilai-nilai dan sistem ini justru mendapat legitimasi sangat kuat dalam konteks NKRI, namun dalam kenyataannya, nilai-nilai dan sistem ini justru tidak diterapkan. Itulah sebabnya, nilai-nilai dan system ekonomi kerakyatan hanya menjadi wacana sepanjang masa. (2) membaca berbagai tulisan dan diskusi tentang nilai-nilai dan sistem ekonomi kerakyatan ini, ada konotasi keberpihakan kepada sekelompok rakyat jelata, dan seakan-akan melupakan 'kelompok rakyat' lainnya. Betapapun rakyat jelata selama ini menderita dan tidak mendapat perlakuan sewajarnya secara ekonomi, melupakan satu kelompok rakyat, justru memberikan kesan ketidak adilan. (3) Nilai-nilai dan system ekonomi kerakyatan, sama sekali tidak menyinggung sesuatu yang berdasarkan norma keagamaan

justru diharamkan, seperti praktik riba dalam segala bentuknya, dan praktik-praktik ketidakadilan lain.

Pilihan yang menurut hemat penulis paling tepat dengan semangat dasar Muhammadiyah adalah tentunya nilai-nilai dan system ekonomi Islam. Agak ironis memang, dalam Negara yang memiliki penduduk Muslim terbesar dunia, masih terjadi phobia terhadap Islam, termasuk phobia dengan istilah yang bernuansakan Islam. Tidak semestinya, sikap phobia seperti ini, diikuti pula oleh Muhammadiyah.

Adalah menarik memperhatikan apa yang ditulis oleh Taufiq (2009) belum lama di Kompas On-line sebagai berikut:

*Sejak iB (Islamic Bank, penulis) beroperasi secara resmi di Indonesia tahun 1992, bisa jadi Boediono adalah Gubernur BI pertama yang secara terbuka menyatakan komitmen untuk melakukan pengembangan iB bahkan jauh sebelum resmi menjabat sebagai Gubernur.*

*Sekalipun detailnya tidak diketahui publik, dalam fit and proper test oleh DPR tahun lalu, Boediono menjadikan pengembangan iB sebagai salah satu programnya. Ia bahkan melewati Syafruddin Prawiranegara, Gubernur BI di tahun 1951, yang namanya kini diabadikan sebagai salah satu nama gedung di komplek kantor pusat BI dan kantor Dephan.*

*.....sekalipun sudah lama punya lembaga pendidikan perbankan yang berada di Jalan Kramat Raya Jakarta Pusat, Muhamadiyah, ternyata tidak menjadikan pengembangan iB sebagai salah satu programnya. Padahal organisasi ini punya tokoh seperti Syafruddin Prawiranegara dan disebut mantan Deputy Senior Bank Indonesia Anwar Nasution di tahun 2001 sebagai Gubernur BI terbaik sepanjang masa.*

*Muhamadiyah sendiri, melalui Majelis Tarjih-nya baru menyatakan fatwa bunga bank haram di tahun 2007, atau tiga tahun setelah Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang sama....*

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2009/02/06/10234667/ib.dan.boediono>).

Tulisan di atas – suka tidak suka – menunjukkan sikap Muhammadiyah yang dapat dikategorikan sebagai ormas Islam yang tidak lepas dari phobia Islam itu sendiri.

Mungkin menarik juga merujuk apa yang ditulis Edo Segara (2008) “bahwa Ekonomi Islam sudah mencakup ekonomi kerakyatan dan ekonomi kerakyatan belum tentu mencakup ekonomi Islam.”

(<http://edosegara.blogspot.com/2008/05/ekonomi-kerakyatan-dan-ekonomi-islam.html>). Hal ini dibuktikan antara lain lewat pengaruh Islam (hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud ) terhadap pasal 33 UUD. Dalam system ekonomi kerakyatan, justru pasal 33 inilah yang menjadi salah satu pilar utamanya [lihat a.l. Edosegara, 2008; Baswir, 2006 [http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/sembul39\\_2.htm](http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/sembul39_2.htm))]

### **Kompatibilitas Ekonomi Islam dengan Emansipasi Rakyat**

Ekonomi Islam [memang baru] digali [lagi] sejak sekitar 60an tahunan yang lalu, atau pertengahan abad ke 20. Namun, secara inherent, logikanya [sistem ekonomi Islam] sudah ada sejak Islam pertama kali dikembangkan oleh Rasulullah saw sekitar 14 abad yang lalu. Mengapa? Karena Islam diyakini oleh ummatnya sebagai agama yang terbaik dan paling benar, lengkap, komprehensif, dan konsekuensinya, pastilah agama Islam sudah menyiapkan segala bentuk keperluan ummatnya, termasuk norma dan ketentuan berekonomi. Sebaliknya, adalah mustahil bila Islam lalai dalam memberikan nilai-nilai, norma ataupun system perekonomian yang justru mendominasi kehidupan ummat pada umumnya. Kelengkapan dan kesempurnaan ini, setidaknya dapat dilihat dalam dua pernyataan tegas Allah SWT dalam QS Al-Maidah (5) : 3:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

3..... pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa[398] karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

dan QS Al-An'am (6): 38:

مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

38. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.

Demikian banyaknya tebaran ayat-ayat dan hadits yang sangat bersinggungan dengan issue ekonomi, merupakan bukti nyata bahwa Islam punya norma, pandangan dan tentunya teori sendiri dalam konteks ekonomi untuk ummatnya.

Oleh karena itu, seharusnya tiada keraguan lagi bagi ummat Islam, khususnya warga Muhammadiyah untuk tidak melihat nilai-nilai Islam yang lengkap dan agung, sebagai sumber utama nilai-nilai dan sekaligus strategi dalam menjalankan misi, dalam rangka mencapai visi, termasuklah visi ekonomi kebangsaan atau NKRI.

Dalam QS 2:2, secara tegas Allah menyatakan bahwa Kitab Al Qur'an adalah sesuatu yang tiada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang yang bertaqwa. Sementara ajaran Islam, termasuk Muhammadiyah selain berpijak kepada Qur'an dan Sunnah, bertujuan jelas mengajak ummat Islam agar menjadi makhluk yang bertaqwa.

Islam adalah agama yang sangat tegas dan jelas mengutamakan emansipasi manusia dari segala bentuk ketidakadilan. Islam adalah yang sangat menghargai sikap egalitarian seperti tersirat dengan jelas dalam QS . Oleh karena itu, tidak perlu pula ada keraguan bahwa sistem kehidupan yang

ditawarkan Islam (dalam sektor kehidupan apapun) akan bertentangan dengan upaya emansipasi manusia yang justru menjadi fondasi kehidupan Islam itu sendiri, tentu saja sejauh penerapan system Islami itu tidak dilakukan penyimpangan-penyimpangan dari asas-asas yang sudah ditetapkan.

### **Perkembangan Terkini Ekonomi Islam**

Sejak digali [kembali] sekitar setengah abad yang lalu, kemudian mulai mendapatkan momentum yang relatif tepat dalam implementasi sejak sekitar tiga dekade belakangan, terlihat dengan sangat jelas akseptensi banyak pihak terhadap keberadaan system ekonomi Islam. Fakta juga membuktikan bahwa penerimaan terhadap keberadaan dan potensinya sebagai salah satu alternative system ekonomi yang menjanjikan, tidak hanya berlaku atau terjadi di kalangan masyarakat atau Negara yang mayoritas penduduknya Muslim, tetapi sudah melintasi batas agama, keyakinan, bangsa, bahasa, budaya dan bahkan sistem ekonomi itu sendiri. Artinya, sulit membantah saat ini, bahwa semua pihak sudah mengakui keberadaannya, sebagai salah satu system perekonomian dunia. Negara-negara yang sangat kapitalis sekalipun saat ini seakan-akan berlomba-lomba mempelajari dan menerapkannya.

Kajian ilmiah dan populer tentang sistem ini, semakin banyak dilakukan. Sehingga perkembangan wacana dan publikasinya, juga berjalan begitu cepat dan luas. Dalam berbagai konferensi internasional, hampir di semua Negara, topic ekonomi Islam dan semacamnya (bisnis, manajemen, lembaga keuangan, dan seterusnya) sudah lazim menjadi bagian topik umum yang ditawarkan. Presenter dan audien yang terlibat mendiskusikannya, bukan lagi dimonopoli oleh pakar Muslim, tetapi meluas dari berbagai agama atau keyakinan lain. Begitu pula dalam aspek latar belakang bangsa, bahasa dan sebagainya.

Bahwasanya banyak pula kiritik yang muncul terhadap system ekonomi Islam, sama sekali tidak menafikan keberadaan dan perkembangannya. Kritik tersebut

– sesuatu yang sangat lazim dalam dunia akademik – justru menjadi wahana dan media proses pematangannya sebagai sebuah system yang ilmiah.

Diantara kritik yang mungkin sering menjadi wacana publik adalah: (1) belum adanya pengertian dan dasar teori yang kokoh [sebagaimana teori konvensional?] (2) pelaksanaannya yang masih terbatas dan [masih hanya] diwakili oleh sektor keuangan. (3) sejumlah produk yang bersifat ambigu, atau dicurigai mengandung nilai-nilai yang tidak sesuai dengan syariah.

Bukan untuk membantah secara buta, beberapa kritik tersebut mungkin saja mengandung kebenaran, tetapi bukankah system ini baru digali ulang, setelah sekian lama terbenam dan terlupakan. Ketiga kritik di atas, bukanlah alasan yang dapat diterima untuk (a) menolak penerapan ekonomi Islam sebagai salah satu strategi dasar yang diperjuangkan dalam mencapai visi ekonomi umat atau bangsa, bahkan juga (b) untuk menunda sekalipun. Sebaliknya, segala kekurangan yang ada, harus menjadi perhatian seluruh kemampuan tenaga ahli yang dimiliki Muhammadiyah untuk memperbaiki dan menggali lebih dalam lagi, sehingga wujudlah akhirnya sebuah system yang memang sesuai dengan semangat dasar Muhammadiyah itu sendiri.

Sebuah kekhawatiran bahwa ekonomi Islam dapat menggiring kepada terjadinya kapitalisme Islam, hemat penulis adalah sesuatu menandakan bahwa masih ada keraguan kepada system itu sendiri. Selain itu, bila gejala itu memang terjadi, tiada yang harus disalahkan dari sistemnya. Sebaliknya, perlu dilihat niat dan kecenderungan para pelakunya. Sebaik apapun sebuah sistem, alat, metode, atau semacamnya, bila diniatkan untuk sebuah kemungkaran, maka akan terciptalah kemungkaran itu. Oleh karena itu, dalam kerangka ini, Muhammadiyah berpotensi besar memastikan bahwa system ekonomi Islam dapat berjalan efektif, manakala Muhammadiyah bias memainkan perannya dalam aspek manusianya lewat (1) penggalan terus menerus ilmu ekonomi Islam ini, dan (2) menyiapkan para profesional yang selalu memegang teguh asas-asas Islam itu sendiri.

## **Ikhtitam**

Secara ringkas, makalah ini sudah coba memberikan pandangan sederhana tentang apa yang dapat dilakukan Muhammadiyah dalam membangun visi bangsa Indonesia dalam konteks ekonomi. Makalah ini tentu saja masih sangat dangkal, dan hanya memberikan kerangka umum. Perlu ada proses lebih lanjut dalam bentuk diskusi intensif yang akan mengisi seutuhnya kerangka yang ditawarkan.

Dalam makalah ini pula sudah coba dijawab beberapa persoalan dasar tentang visi dan strategi, pilihan atas sistem ekonomi: kapitalisme, sosialisme, kerakyatan, berkeadilan atau Islam. Sudah barang tentu, bagi Muhammadiyah sudah selayaknya memperjuangkan agar pilihan system ekonomi Islam dengan segala nilai-nilainya menjadi prioritas utama, tidak saja karena factor momentum yang sangat tepat, tetapi lebih kepada keyakinan karena memang pilihan itulah pilihan terbaik bagi bangsa dan ummat, sesuai pula dengan garis perjuangan gerakan Muhammadiyah ini sendiri.

Wallahu a'lam bisshowab.



## **Referensi**

- Baswir, Revrisond (2006) “Ekonomi Kerakyatan”,  
[http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/sembul39\\_2.htm](http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/sembul39_2.htm)
- Collins, James C. and Jerry I.Porras [undated] “Organizational Vision and Visionary Organizations”, *California Management Review*, Vol 34, No. 1, reloaded in  
<http://books.google.com.my/books?hl=en&lr=&id=MGugUnmvhVQC&oi=fnd&pg=PA234&dq=definition+of+organizational+vision&ots=KlfsnrnAhf&sig=N6PE5N9cTrClhDWageabGqY4a0I>
- Edosegara (2008), <http://edosegara.blogspot.com/2008/05/ekonomi-kerakyatan-dan-ekonomi-islam.html>
- Hermawan Sulistyo, [http://www.aceh-eye.org/a-eye\\_news\\_files/a-eye\\_news\\_bahasa/news\\_item.asp?NewsID=10112](http://www.aceh-eye.org/a-eye_news_files/a-eye_news_bahasa/news_item.asp?NewsID=10112)
- Heru (2006), “Visi”, <http://heru.wordpress.com/2006/07/26/mereview-kembali-visi-misi-organisasi/>
- <http://www.exforsys.com/career-center/leadership-skills/how-to-develop-a-powerful-vision.html>
- Taufik (2009), “IB dan Boediono”,  
(<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2009/02/06/10234667/ib.dan.boediono>)
- Usman Iskandar (2009), “Pemerintah SBY-JK Dinilai Tidak Memiliki Visi”  
[http://article.wn.com/view/2009/02/14/Pemerintahan\\_SBYJK\\_Dinilai\\_Tidak\\_Memiliki\\_Visi/](http://article.wn.com/view/2009/02/14/Pemerintahan_SBYJK_Dinilai_Tidak_Memiliki_Visi/)

## **Lampiran 1: Sekilas Tentang Visi**

### **Visi**

Visi menggambarkan tujuan atau kondisi dimasa depan yang ingin dicapai. Visi memberikan gambaran yang jelas dimasa mendatang yang bisa dilihat oleh customer, stakeholders, dan employee.

Pernyataan visi yang bagus tidak hanya menginspirasi dan menantang, namun juga sangat berarti sehingga setiap pegawai bisa menghubungkan tugas yang dilakukannya dengan visi. Pernyataan visi harus mampung menjadi inspirasi dalam setiap tindakan yang dilakukan setiap pegawai. Yang paling penting pernyataan visi harus measurable, terukur sehingga setiap pegawai bisa mengetahui apakah tindakan yang dilakukannya dalam rangka mencapai visi organisasi atau tidak.

Pernyataan visi yang baik harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

- **Succinct**

Pernyataan visi harus singkat sehingga tidak lebih dari 3-4 kalimat.

- **Appealing**

Visi harus jelas dan memberikan gambaran tentang masa depan yang akan memberikan semangat pada customer, stakeholder dan pegawai.

- **Feasible**

Visi yang baik harus bisa dicapai dengan resource, energi, waktu. Visi haruslah menyertakan tujuan dan objective yang stretch bagi pegawai.

- **Meaningful**

Pernyataan visi harus bisa menggugah emosi positif pegawai namun tidak boleh menggunakan kata-kata yang mewakili sebuah emosi.

- **Measurable**

Pernyataan visi harus bisa diukur sehingga dimungkinkan untuk melakukan pengukuran kinerja sehingga setiap pegawai bisa mengetahui apakah visi sudah bisa dicapai atau belum. Sebagai contoh visi SCTV “satu untuk semua” yang berarti acara-acara SCTV harus bisa dinikmati semua kalangan, semua umur mulai balita sampai manula, cukup dengan melihat SCTV kebutuhan orang terhadap informasi & hiburan dan lain-lain bisa dipenuhi.

Sumber: <http://heru.wordpress.com/2006/07/26/mereview-kembali-visi-misi-organisasi/>,

## **Lampiran 2: Visi, Misi Pemerintahan Sby-JK**

### **Visi**

1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai.
2. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan hak-hak asasi manusia.
3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.

### **Misi**

1. Mewujudkan Indonesia yang aman damai
2. Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis
3. Mewujudkan Indonesia yang sejahtera

## **INDONESIA KE DEPAN DAN PRINSIP-PRINSIP DASARNYA**

Kita akan memastikan Indonesia ke depan sebagai Indonesia yang :

1. Berkembang berdasar jiwa, semangat, dan konsensus dasar berdirinya NKRI, terutama Pancasila, Pembukaan UUD 1945, keutuhan NKRI, dan berkembangnya pluralitas/kemajemukan/kebinekaan;
2. Tahan terhadap guncangan perubahan, resesi, dan krisis;
3. Yakin akan keharusan pergaulan internasional; dan
4. Lebih aman dan damai, lebih adil dan demokratis, dan lebih sejahtera.

Perjalanan Indonesia ke depan memastikan diri untuk :

1. Tidak lagi memperdebatkan Pancasila, Pembukaan UUD 1945, keutuhan NKRI, dan berkembangnya sistem kemasyarakatan yang majemuk; bahkan sebaliknya, memastikan diri menjadikannya sebagai prinsip untuk menjalankan sistem pembangunan, pemerintahan, kenegaraan, serta kehidupan bersama;
2. Menjalankan demokrasi dan memastikan berlangsungnya konsolidasi demokrasi, termasuk mengembalikan kedaulatan pada rakyat untuk memilih pemimpin-pemimpinnya;
3. Menata sistem hukum dan peraturan perundang-undangan sejalan dengan konsensus dasar tersebut dengan meninjau kembali semua peraturan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara; dan
4. Menjaga dan menghormati hak-hak asasi manusia.

## **STRATEGI DASAR**

1. Menata kembali sistem ketatanegaraan RI berdasarkan jiwa, semangat dan konsensus dasar berdirinya NKRI; yaitu, dengan memastikan bahwa Pancasila, UUD 1945, keutuhan NKRI, dan berkembangnya sistem kemasyarakatan yang majemuk menjadi dasar penataan tersebut. Hal ini untuk mengembangkan:

(a) sistem sosial-politik yang berkelanjutan; dan

(b) sistem dan kelembagaan pembangunan, pemerintahan, dan ketatanegaraan yang tahan terhadap berbagai goncangan dan krisis.

2. Membangun Indonesia di segala bidang melalui peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat Indonesia melalui :

(a) penyediaan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat;

(b) penciptaan landasan yang kokoh bagi pembangunan berkelanjutan; dan

(c) pengembangan kemasyarakatan di berbagai bidang.

## **AGENDA DAN PROGRAM KERJA**

**I. Pertahanan, Keamanan, Politik, dan Sosial untuk Mewujudkan Indonesia yang Lebih Aman dan Damai**

**II. Keadilan, Hukum, HAM dan Demokrasi untuk Mewujudkan Masyarakat yang Lebih Adil dan Demokratis**

**III. Ekonomi dan Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Masyarakat yang Lebih Sejahtera**

1. Perbaikan dan penciptaan kesempatan kerja.
2. Penghapusan kemiskinan.
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi dan sosial, termasuk infrastruktur pertanian, pedesaan, kaitan pedesaan-perkotaan, dan Indonesia Timur.
4. Revitalisasi pertanian dan pedesaan serta peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup petani dan rumah tangga petani.
5. Pengembangan ragam aktivitas ekonomi pedesaan dengan mendorong industrialisasi pedesaan.

6. Pelaksanaan reforma agraria.
7. Pengembangan aktivitas ekonomi kelautan dan kawasan pesisir serta peningkatan kesejahteraan kehidupan nelayan.
8. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta usaha informal.
9. Pengembangan akses petani, nelayan, UMKM, dan usaha informal terhadap sumber permodalan, informasi, serta kepastian dan perlindungan hukum.
10. Penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang mendorong tumbuhnya perekonomian nasional, khususnya sektor riil.
11. Peningkatan kinerja dan stabilitas ekonomi makro.
12. Pengelolaan fiskal, termasuk hutang publik, secara lebih efektif, efisien, dan bertanggung jawab.
13. Pengembangan fiskal yang mendorong tumbuhnya sektor riil, kesempatan kerja, dan hak-hak dasar rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fiskal.
14. Peningkatan upaya-upaya penyehatan dan penertiban lembaga keuangan dan perbankan.
15. Pengelolaan aset-aset negara secara efisien dan bertanggung jawab.
16. Restrukturisasi dan profesionalisasi usaha-usaha sektor publik melalui debirokratisasi dan depolitisasi.
17. Pengembangan ekonomi pasar yang berdasarkan hukum yang berkeadilan serta praktek ekonomi yang berlaku secara internasional.
18. Peningkatan peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi antar negara.
19. Pengembangan industri manufaktur, pariwisata, dan IT yang memiliki daya saing dan responsif terhadap penyerapan tenaga kerja.
20. Peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan dan keterampilan yang lebih berkualitas.
21. Pengembangan fasilitas pendidikan serta peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik.
22. Peningkatan kesejahteraan pegawai negeri, TNI, Polri, dan pensiunan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas.

23. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih berkualitas.
24. Pengembangan sistem jaminan kesehatan bagi rakyat miskin.
25. Peningkatan kesejahteraan rumah tangga, perempuan, dan anak terutama golongan miskin, penyandang cacat, serta yang tinggal di daerah terpencil dan di daerah konflik.
26. Penghapusan ketimpangan ekonomi, sosial, dan politik dalam berbagai bentuknya.
27. Perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian mutu lingkungan hidup.
28. Perbaikan kualitas, proses, dan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi yang menjamin mobilitas barang, jasa, manusia, dan modal serta pelayanan publik.

Sumber: <http://turwahyudin.wordpress.com/2008/05/15/visi-misi-dan-program-kerja-pemerintahan-sby-jk/>